

PEMBINAAN MENTAL MASYARAKAT KINTAMANI MASA BALI KUNO

Mental Coaching Community Kintamani Bali's Ancient Period

Nyoman Rema dan I Nyoman Sunarya

Balai Arkeologi Bali

Jl. Raya Sesetan No. 80, Denpasar

Email: nyoman.rema@kemdikbud.go.id; nyoman.sunarya@kemdikbud.go.id

Naskah diterima: 04-07-2017; direvisi: 13-10-2017; disetujui: 24-10-2017

Abstract

The research on Sukawana and Kintamani inscriptions carries various benefits that are multidimensional, as representation of life of old people in Cintamani Village, one of them is socio-cultural aspect, which can be used to build and strengthen the identity or character of the nation in the future. The purpose of this study is to reveal the mental guidance of the Kintamani community in Ancient Bali. This research is a qualitative research, the data source is secondary data from two Archaeological Research News, namely Sukawana Inscription and Kintamani Inscription. Both of these inscriptions describe the problem of mental guidance by the rulers to the Cintamani community to carry out their duties properly without any unrest caused by the tax collectors, and the mutual respect of each other. The guidance done in the sequence creates social stability, human rights development, improves people's economy, conserves the environment, mentals society, implements religious sanctions including law and social for offenders.

Keywords: mental coaching, community cintamani, the ancient bali.

Abstrak

Penelitian terhadap Prasasti Sukawana dan Kintamani menyanggah berbagai manfaat yang bersifat multidimensional, sebagai representasi kehidupan masyarakat dahulu kala di Desa Cintamani, salah satunya adalah aspek sosio-kultural, yang dapat digunakan untuk membangun dan mengukuhkan jatidiri atau karakter bangsa ke depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pembinaan mental masyarakat Kintamani pada masa Bali Kuno. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang sumber datanya berupa data sekunder dari dua Berita Penelitian Arkeologi, yaitu Prasasti Sukawana dan Prasasti Kintamani. Kedua prasasti ini menguraikan masalah pembinaan mental oleh para penguasa kepada masyarakat Cintamani agar menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya tanpa adanya keresahan yang ditimbulkan oleh para pemungut pajak, dan adanya saling menghargai antar sesama. Pembinaan yang dilakukan dalam rangkaian menciptakan stabilitas sosial, pembinaan hak asasi manusia, meningkatkan ekonomi masyarakat, memelihara kelestarian lingkungan, membina mental masyarakat, menerapkan sanksi religi termasuk hukum dan sosial bagi pelanggar.

Kata kunci: pembinaan mental, masyarakat cintamani, bali kuno.

PENDAHULUAN

Pulau Bali terkenal banyak menyimpan benda-benda bernilai arkeologis. Benda-benda tersebut sampai sekarang masih dikeramatkan, lebih-lebih yang berupa prasasti akan disucikan dan disimpan oleh pemiliknya dengan sistem

pengamanan yang sangat ketat. Prasasti sebagai salah satu warisan budaya masa lalu memiliki peran yang sangat penting dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, karena di dalamnya terdapat berbagai macam data yang menyangkut aspek pembinaan keagamaan,

kemasyarakatan, perekonomian, lingkungan, dan lain-lain dalam upaya pembinaan mental masyarakat (Jaya 1998, 37).

Pembinaan mental berasal dari kata pembinaan dan mental. Pembinaan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “bina¹” berarti bangun sesuatu (negara, orang, dan sebagainya) supaya lebih baik. Mendapat awalan pe- dan akhiran -an, menjadi pembinaan yang berarti: 1. proses, cara, perbuatan membina; 2. pembaruan, penyempurnaan; 3. usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Mental menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “mèntal” berarti bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Jadi pembinaan mental dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina batin dan watak manusia. Jika ditinjau kembali menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “batin” berarti sesuatu yang terdapat di dalam hati; 1. sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya); 2. Sesuatu yang tersembunyi; 3. semangat, hakikat. Sedangkan watak menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “watak” berarti sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat.

Terkait dengan pembinaan mental masyarakat Kintamani, ditinjau dari dua prasasti, yaitu *Prasasti Sukawana* dan *Prasasti Kintamani* yang di dalamnya terdapat keterangan mengenai perintah dan pembinaan mental oleh raja yang ditujukan kepada *karaman i cintamani*. Prasasti Sukawana ditemukan di Desa Sukawana, dan terbagi dalam lima kelompok, yaitu Prasasti Sukawana AI, AII, B, C, dan D, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 21 lembar. Dari semua prasasti tersebut hanya empat kelompok yang berkenaan dengan *karaman i cintamani*, yakni Prasasti Sukawana AI, AII, B, dan C, tetapi Prasasti Sukawana D berisikan tentang *karaman i sikawana*. Adapun, Prasasti Kintamani disimpan di Pura Bale Agung Kintamani, Desa Kintamani. Prasasti Kintamani terbuat dari tembaga yang

terdiri atas 17 lempeng, yang dikelompokkan ke dalam 7 kelompok prasasti. Kedua desa ini, yaitu Desa Sukawana dan Kintamani, terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penamaan prasasti dalam penelitian ini mengikuti penamaan yang dipakai oleh Roelof Goris dalam bukunya *Prasasti Bali I* (Suarbhawa et al. 2013, 4; Sunarya et al. 2015, 3, 5; Goris 1954).

Penelitian terhadap Prasasti Sukawana dan Prasasti Kintamani telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali, yang kemudian diterbitkan dalam jurnal *Berita Penelitian Arkeologi* pada tahun 2013 dan 2015. *Berita Penelitian Arkeologi* tentang Prasasti Sukawana dan Kintamani memuat alih aksara dari aksara sumber yaitu aksara Bali Kuno ke dalam aksara Latin, dan alih bahasa dari bahasa sumber yaitu bahasa Kawi ke bahasa Indonesia. Terdapat juga pembahasan sekilas tentang berbagai persoalan yang terdapat dalam prasasti tersebut, tetapi belum secara khusus menyinggung masalah pembinaan mental kepada masyarakat Kintamani (Suarbhawa et al. 2013; Sunarya et al. 2015). Kegunaan kedua pustaka ini adalah sebagai sumber data untuk mengkaji masalah pembinaan mental masyarakat Kintamani masa Bali Kuno.

Penelitian berikutnya adalah artikel berjudul *Makna Sapatha dalam Prasasti Sukawana*, yang membahas tentang berbagai makna terkait dengan sapatha dalam Prasasti Sukawana, yakni makna kekuasaan, religi, dan hukum (Sumerata 2016, 141). Kegunaan artikel ini adalah untuk mengkaji pembinaan mental terkait dengan sanksi religi untuk masyarakat Kintamani. Kebaruan dari penelitian ini adalah dari tematis kajiannya yang mengetengahkan permasalahan pembinaan mental masyarakat Kintamani masa Bali Kuno, yang merupakan campur tangan kerajaan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Desa Kintamani yang dahulu disebut *Cintamani* dalam prasasti.

Prasasti yang dianugerahkan untuk masyarakat Cintamani, senantiasa dijadikan

pedoman atau sumber orientasi oleh semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan dan mampu memberikan gambaran mengenai pranata sosial, yang mencakup bidang politik, agama, dan ekonomi (Rahardjo 2011, 12, 13, 29, 30). Bidang-bidang tersebut dikaitkan dengan pembinaan yang diberikan kerajaan, bertujuan untuk menciptakan keteraturan masyarakat dan tatanan sosial. Pelaku politik (*politician*) berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik agar mencapai tujuan normatif suatu masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para pelaku yang terlibat di dalam politik, bertugas dalam membuat dan menerapkan hukum atau peraturan demi tercapainya masyarakat yang taat hukum, teratur, sejahtera, dan harmonis, melalui penganugerahan prasasti, yang disaksikan juga oleh pejabat-pejabat kerajaan dalam sidang kerajaan (Astra 1997, 220-221; Turner 2006, 445).

Prasasti pada masa Bali Kuno merupakan sebuah solusi untuk menangani masalah yang terjadi saat itu, dan itu senantiasa dijadikan pedoman, sehingga terdapat kesepahaman antara raja, pejabat kerajaan dengan masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Kintamani, raja sebagai pengayom masyarakat Kintamani selalu memperhatikan kegiatan masyarakatnya, hal ini dapat dilihat dari kasus pembangunan pertapaan dan pesanggrahan di bukit Kintamani, karena di daerah tersebut tidak terdapat tempat untuk masyarakat yang melakukan perjalanan hilir-mudik. Hal ini mengandung maksud agar masyarakat yang melakukan perjalanan mendapatkan tempat beristirahat, dan kegiatannya dapat berjalan lancar. Selain itu, dapat pula dimaknai bahwa hal itu juga mengandung maksud agar masyarakat yang melewati daerah tersebut juga mendapatkan wejangan ajaran keagamaan.

Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat Bali Kuno, mengedepankan pendidikan sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga keharmonisan dapat

dijaga. Berkaitan dengan ini, dikenal beberapa istilah berhubungan dengan pendidikan seperti *mandala*, *patapan*, dan *wihara*. *Mandala* dalam konteks pendidikan keagamaan, berarti tempat kelompok rohaniawan atau suatu pusat pendidikan agama yang dipimpin oleh seorang yang disebut *dewaguru*. Tempat dan seluruh sistem sarana pendidikan keagamaan itu disebut *kadewagurwan*. Istilah *mandala* juga digunakan dalam ritual agama Buddha. Dalam hal ini *mandala* merupakan suatu konstruksi diagramatik untuk menggambarkan keseluruhan kosmos yang di dalamnya terdapat susunan konsentris dan hierarkis para “dewata”, simbol antropomorfik dari konsep-konsep. “Dewata” yang di tengah, yaitu di pusat *mandala*, adalah lambang yang dipilih, dan dengan demikian disebut *Istadewata*, dari Yang Maha Benar. *Patapan* merupakan tempat untuk mengasingkan diri, guna menjalankan upaya keagamaan di tempat sepi untuk beberapa lama, sampai mendapatkan apa yang diinginkan. *Wihara* adalah asrama rohaniawan, khususnya yang beragama Buddha (Rahardjo 2013, 8-9).

Pemecahan masalah dan pembinaan mental pada masa Bali Kuno tidak terlepas dari peran orang-orang suci, karena melalui orang suci dan asramanya, tempaan mental dilaksanakan oleh para rohaniawan. Pembangunan media pemujaan secara berdampingan, sebagaimana dapat disaksikan di kompleks pertapaan Goa Gajah, yang terdiri atas peninggalan agama Buddha dan Siwa (Suantika 2015, 177). Selain sebagai pertapaan, tempat ini juga dimanfaatkan sebagai *gria*, atau rumah tempat tinggal bagi para rohaniawan (Goris 1948, 14). Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan keagamaan menduduki posisi yang sangat penting (Jaya 1993, 14).

Jika ditinjau, kedua tinggalan yang berdampingan ini memiliki perangkat berupa media pemujaan dan ceruk pertapaan. Hal ini mengindikasikan adanya aktivitas pemujaan kepada Tuhan, sekaligus aktivitas olah rohani, sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Pembangunan ini selain untuk

olah rohani masing-masing pemeluk agama tersebut, juga untuk membina hubungan yang harmonis antar sesama, sehingga kerukunan dan kesejahteraan dapat terwujud. Dalam konteks ini meskipun media pemujaan berbeda, tetapi dalam ranah kemanusiaan mesti tetap membina kerukunan demi tetap terwujudnya keharmonisan. Olah rohani semacam ini dilandasi oleh filosofi masing-masing agama tersebut, yang menghendaki adanya kerukunan, baik dalam dirinya sendiri, diri sendiri dengan Tuhan, diri sendiri dengan sesama, dan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat terkait bagaimana pembinaan mental yang dilakukan di Kintamani pada Masa Bali Kuno. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi cara hidup dan perilaku manusia atau masyarakat pendukung budaya materi di masa lalu, dan menjelaskan proses perubahan budaya melalui sumber data tertulis. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang proses pembinaan mental masyarakat Kintamani pada masa Bali Kuno. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap budaya masa lampau yang adiluhung, yang diwariskan oleh para leluhur yang dapat mempertinggi derajat dan martabat bangsa. Secara pragmatis diharapkan dapat dijadikan suri-tauladan oleh masyarakat pendukung Prasasti Sukawana dan Kintamani khususnya, dan masyarakat Bali umumnya dalam berperilaku, dengan tetap memperhatikan relevansinya pada era sekarang.

Permasalahan pembinaan mental sangat penting dilakukan melalui data-data prasasti karena di dalamnya terdapat nilai-nilai sosio-kultural yang dapat digunakan untuk membangun dan mengukuhkan jatidiri dan karakter bangsa ke depan, dalam menghadapi kehidupan global, perkembangan multikultural dan kehidupan yang sangat kompetitif di tengah-tengah kemajuan teknologi (Sutaba 2013, 5). Permasalahan pembinaan mental ditafsirkan

secara hermeneutika, yang mengungkapkan bahwa dalam pembacaan teks, untuk melacak unsur-unsur yang kemudian dibongkar, bukanlah dari sisi inkonsistensi logis, argumen yang lemah, atau premis tidak akurat yang terdapat dalam teks, melainkan unsur yang secara filosofis menjadi penentu atau unsur yang memungkinkan dari teks filosofis tersebut, jelasnya, kemungkinan filsafat itulah yang dipersoalkan. Dalam pembacaan ini, filsafat diartikan sebagai tulisan, oleh karena itu filsafat tidak pernah berupa ungkapan transparan berupa pemikiran secara langsung, tetapi disampaikan melalui sistem tanda yang berkarakter material, baik grafis maupun fonetis, dengan konteks dan kepentingan filosofis dengan bahan baku berupa konsep-konsep oposisi alam dan budaya, fakta dan nilai, ideal dan material, guna dapat mempertanyakan akan kebenaran oposisi, dasar, dan dampak dari oposisi tersebut (Norris 2009, 11).

Dalam kajian ini, objek yang akan dianalisis dipandang sebagai teks, teks diartikan sebagai jaringan ringkas yang dibalikinya tersembunyi makna (kebenaran). Sekarang ditegaskan kembali bahwa ide utama yang menciptakan teks dalam jaringan tersebut, kini sedang diciptakan terus menerus (Barthes dikutip Lubis 2014, 32). Teori hermeneutika dibantu dengan teori religi, berkenaan dengan dimensi budaya agama, yang diartikan sebagai susunan arti yang dibawa simbol, tempat meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan sikap terhadapnya. Agama adalah suatu sistem budaya yang terdiri dari sistem simbol yang berperan membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, persuasif, dan tahan lama dalam diri manusia dengan cara merumuskan konsepsi tatanan kehidupan yang umum dan membungkus konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas, sehingga suasana hati dan motivasi tampak realistik secara unik (Geertz 2001, 413-423).

Koentjaraningrat mengusulkan konsep religi dipecah ke dalam 5 komponen yang mempunyai perannya sendiri-sendiri, tetapi

sebagai bagian dari suatu sistem berkaitan erat satu dengan lain. Kelima komponen itu adalah: emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritus dan upacara, dan umat agama (Koentjaraningrat 1987, 80-82). Namun untuk membahas pembinaan mental digunakan sistem keyakinan yang nantinya akan berdampak kepada tebalnya keimanan masyarakat terhadap Tuhan dan manifestasinya sehingga berdampak psikologis, yang menimbulkan ketaatan yang kuat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang secara inheren merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terkait dengan kehidupan masyarakat, dengan proses yang bersifat siklus (Denzin dan Lincoln 2009, 3; Sugiyono 1992, 2). Penelitian kualitatif tersebut ditunjang dengan metode analisis isi (*content of analysis*). Isi dalam metode analisis isi terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah, sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi, menggunakan sarana pengamatan mencakup dokumen, buku, dan lain-lain (Ratna 2006, 48). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematis-filosofis. Menurut Mulyana (2001, 33-35) pendekatan subjektif dalam penelitian ilmu sosial mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat yang objektif dan tetap, melainkan bersifat interpretatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dalam bentuk kalimat, kata-kata, ungkapan, dan gambar atau foto (Sugiyono 2001, 3). Sedangkan sumber datanya adalah sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui observasi terhadap salinan naskah Prasasti Sukawana dan Kintamani yang memuat tentang pembinaan mental untuk masyarakat Kintamani. Data penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan,

berupa teks dan terjemahan Prasasti Sukawana dan Prasasti Kintamani, buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang terkait dengan topik penelitian (Kaelan 2005, 176; Mulyana 2001, 196).

Pengumpul data kajian ini yang utama adalah peneliti, yang didukung dengan peralatan seperti alat tulis, laptop, untuk mencatat, mengetik, dan merekam data. Moleong (1993, 4) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Data yang telah terkumpul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yang disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas dan mendalam, dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Muhadjir 2002, 45; Milles dan Haberman 1992, 16-19). Hasil analisis disajikan berupa uraian kata-kata, kalimat atau narasi, dan gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Stabilitas Sosial

Bali memiliki tinggalan masa lampau yang beragam, yang diwariskan oleh leluhurnya. Hal ini patut disyukuri dan dihargai, dengan jalan mengadakan studi mendalam, kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya pelestarian, dan publikasi sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Salah satunya berupa prasasti yang di dalamnya memuat berbagai informasi, antara lain mengenai struktur kerajaan, birokrasi, kemasyarakatan, agama, perekonomian, kepercayaan, dan adat istiadat dalam masyarakat Bali Kuno.

Sampai saat ini tinggalan itu masih bersifat *living monument*, dan dianggap sebagai pusaka atau warisan leluhur yang umumnya disimpan pada bangunan suci. Prasasti dikeluarkan oleh raja-raja masa Bali Kuno dalam rangkaian memecahkan masalah yang terjadi waktu itu, sekaligus dijadikan sebagai pedoman terkait pendapatan kerajaan akan pajak, pembinaan mental masyarakat, dalam menciptakan stabilitas kerajaan (Suarbhawa et al. 2013, 1-2). Peninggalan arkeologi tersebut merupakan

kebanggaan khusus, karena mencerminkan suatu kemampuan dan keberhasilan yang telah dicapai pada masa itu (Sutaba 1993, 26).

Pembinaan mental yang dimaksud adalah pembinaan masyarakat Kintamani pada masa Bali Kuno. Toponimi Kintamani, telah ada sejak masa Bali Kuno, termuat dalam Prasasti Sukawana dan Kintamani dari nama Cintamani (Sunarya et al. 2015, 36). Pembinaan mental masyarakat, terkait dengan permohonan dan penerbitan prasasti, termuat dalam Prasasti Kintamani kelompok kelima dan keenam yang dikeluarkan oleh baginda Sri Maharaja Haji Ekajaya Lancana beserta ibunya, pada tahun 1122 Saka atau 1200 Masehi.

Permohonan prasasti termuat juga pada Prasasti Sukawana AII, yang dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu atas nama Bhatari yang dicandikan di Burwan, dan Bhatara yang dicandikan di Banyu Wka, pada tahun 976 Saka atau 1054 Masehi. Hal yang sama juga termuat dalam Prasasti Sukawana B, pada tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi, yang diterbitkan oleh Sri Maharaja Jayapangus Arkajacihna, beserta kedua permaisurinya bernama paduka Sri Parameswari Indujalancana dan Sri Mahadewi Sasangkajaketana. Demikian juga dengan Prasasti Sukawana C, yang diduga dikeluarkan oleh Sri Maharaja Jayapangus Arkajacihna (Suarbhawa et al. 2013, 20-33; Sunarya et al. 2015, 32).

Pada masa kerajaan Bali Kuno terjadi perselisihan antara masyarakat Cintamani dengan petugas pemungut pajak, yang membuat masyarakat menjadi tidak berdaya, selalu kalah, dan tidak pernah menemukan kata sepakat membicarakan mengenai kewajibannya pada bulan Cetra, yang menyebabkan masyarakat menjadi gelisah, dan resah. Karena pegangannya ditulis pada daun *tal* (lontar dalam bahasa Indonesia) ini tidak cukup awet, sehingga mengalami kerusakan akibat terbakar dan sebab kerusakan lain, akibatnya mereka kehilangan pegangan yang dijadikan panduan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya,

sebagaimana titah raja waktu dahulu. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menghadap kepada raja, guna memohon kepastian hukum, dengan permohonan penerbitan prasasti, yang dijadikan pegangan hidupnya itu ditulis dalam media tembaga. Permohonan tersebut dikabulkan oleh raja, demi terwujudnya kesejahteraan desa, dan untuk mengatasi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak.

Mengingat masyarakat Cintamani adalah keturunan wesya, yang pada umumnya berprofesi sebagai petani, pedagang, peternak, pengrajin, itu dipandang sebagai mata pencaharian dan sumber penghidupan seluruh masyarakat Kintamani, yang mendasarkan pada ajaran *dharma, artha, kama*, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, teratur, adil, dan makmur yang mendasarkan pada kitab *Manawakamandaka*. Lebih jauh diduga bahwa isi kitab itu mungkin bersumber pada kitab *Manawadharmasastra* dari India dan kitab *Manawadharmmasastra (Manupadesa)* yang dikenal pada jaman Majapahit; boleh dikatakan kitab tersebut sama dengan kitab hukum yang ada pada masa pemerintahan Jayapangus dan boleh jadi merupakan bentuk perkembangannya (Astra 2013, 210-212).

Penerbitan prasasti ini dilakukan selain untuk mengembalikan ketenteraman atau kestabilan masyarakat, karena terdapatnya aturan yang pasti akan kewajiban yang mereka tunaikan berikut dengan haknya, pemungut pajak juga tidak dapat melebihi ataupun mengurangi pungutan dari masyarakat. Hal ini juga nantinya akan memastikan akan tercapainya pendapatan kerajaan dari berbagai sektor yang telah diatur, sehingga tidak ada lagi perselisihan antara masyarakat Cintamani dengan petugas pemungut pajak, tidak lagi resah, sebab telah terdapat kesepakatan hak dan kewajibannya, sebagaimana tertuang dalam prasasti yang ditulis menggunakan media yang kuat berupa tembaga. Dengan adanya berbagai hal di atas, maka akan terjadi kestabilan sosial masyarakat.

Pembinaan Hak Asasi Manusia

Pembinaan mental pada masyarakat Kintamani bertujuan agar tidak semena-mena terhadap sesama sekalipun itu adalah seorang budak, tetap perlu mendapatkan perlindungan, dan tidak boleh dibunuh, dianiaya, ditawan, atau diperlakukan kurang manusiawi, pihak-pihak yang melanggar akan dikenakan denda. Mereka juga tidak boleh dihina, dengan cara menyebarluaskan berita bahwa ada budak yang terlilit hutang. Hal ini akan berpengaruh positif bagi budak tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat, sekaligus menunjukkan perlindungan raja kepada masyarakat kecil yang perekonomiannya kurang mampu, yang dapat membantu mempertahankan harkat kemanusiaan masyarakat golongan ekonomi lemah dari tindakan pihak pemilik modal, lintah darat, dan lain-lain. Pihak-pihak inilah yang disinyalir sering bertindak arogan ataupun berlaku premanisme (Suarbhawa 2001, 73, 75).

Selain itu, masyarakat Cintamani juga diberikan penghargaan dalam bentuk ijin untuk membeli lahan *Katendan*, untuk perluasan wilayah desa, karena taat mengabdikan kepada raja. Masyarakat Cintamani diharapkan menjadi masyarakat yang dapat mengerti tindakan-tindakan susila, dan sebagai raja yang bijak dikeluarkanlah aturan yang berkenaan pembinaan mental, sehingga masyarakat Cintamani menjadi masyarakat yang berkepribadian, serta berbudi pekerti yang luhur. Untuk mewujudkan hal tersebut raja mengeluarkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Cintamani, seperti mencuri, membegal, membunuh, mengamuk, mengancam, memperkosa, menghadang, mencacimaki, meracun, berujar tidak baik, memukul, merampas, menghadang, merampok, marah, meneluh, meludahi, dan menendang.

Selain itu, jika ada yang berbuat buruk dan kotor agar menghaturkan *caru prayascitta* hari itu pada waktu malam hari, *daksina I masaka*. Jika ada anggota sedesanya *nitikrama* (berbuat/bertingkah laku baik) *dharmabuddhi*

(berbudi luhur) menyelenggarakan upacara/ *yasa* pada bulan *kartika (kapat)* tidak dikenakan *baganjing* (cukai bagi orang yang membuat *baganjing/bangsa?*), tidak meminta ijin upacara kepada *pacaraka haji* (petugas kerajaan yang mengurus upacara), tidak dikenakan batun/iuran *baganjing*, jika menggunakan ijuk (Suarbhawa et al. 2013, 25-27; Sunarya et al. 2015, 28, 32, 36).

Berbagai aturan yang dikeluarkan raja terkait dengan aspek kemanusiaan, sebagaimana disebutkan di atas, dengan harapan dapat terjadi saling menghormati antar sesama manusia bahkan kepada budak sekalipun, sebagai wujud perlindungan raja kepada masyarakat kecil dan golongan ekonomi lemah. Selain itu dipupuk pula perilaku integritas kepada kerajaan, dan memupuk sebanyak-banyaknya orang-orang yang berkepribadian baik, berbudi pekerti yang luhur, melalui pemberian penghargaan, dan pemberian hukuman yang seberat-beratnya bagi orang yang berperilaku tidak baik. Hal ini akan menciptakan perasaan adil bagi masyarakat, yang dapat memupuk terlaksananya keadilan dalam hak asasi manusia.

Pembinaan Bidang Ekonomi

Pada masa Bali Kuno muncul suatu gerakan sosial, terkait keinginan masyarakat suatu desa untuk memohon anugerah prasasti, guna memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Masalah yang paling tampak adalah masalah perekonomian, yang mempengaruhi seluruh kehidupannya (Sunarya 1994, 8, 11). Mengatasi masalah tersebut, juga dengan mempertimbangkan berbagai ketaatan masyarakat Kintamani, sehingga dibebaskan untuk melakukan pekerjaan yang tergolong *candalakarma* sesuai fungsionalnya yaitu pekerjaan yang dianggap beresiko bagi pemuka agama, seperti pande besi, pande perak, undagi, dan sebagainya. Mereka juga bebas pergi kemanapun, dan bebas memelihara binatang.

Pada prasasti kelompok keempat memuat tentang pemberian hak istimewa kepada penduduk Cintamani untuk mengatur aktivitas

perdagangan khususnya kapas dengan wilayah pemasaran di daerah pesisir utara seperti: Les, Paminggir, Buhun Dalem, Julah, Purwa Sidhi, Indra Pura, Bulihan, dan Manasa. Orang-orang di tepi danau tidak melakukan aktivitas perdagangan kapas ke daerah pesisir Bali Utara. Jika hal ini dilakukan, orang-orang Cintamani berhak mengenakan denda, merampas, dan menghentikan aktivitas tersebut.

Selain aktivitas bidang ekonomi di atas, masyarakat Kintamani juga merupakan masyarakat agraris religius, yang mengembangkan pertanian lahan kering dengan tanaman berupa padi gaga, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan, kapas, dan segala aktivitas kehidupannya, selalu berhubungan dengan ritual keagamaan, serta tidak lepas dari keberadaan bangunan suci yang ada di wilayah tersebut. Selain bertani pada lahan kering, masyarakat juga diperkenankan mencari sumber-sumber mata air, dan mengalirkan ke lahan-lahan pertanian.

Hasil pertaniannya ini selain untuk dikonsumsi sendiri dan bahan-bahan upacara, juga sebagai komoditas perdagangan. Sektor peternakan juga dikembangkan, dengan binatang peliharaan seperti kambing, kuda, sapi, babi, dan ayam. Perdagangan antar desa juga dilakukan dari pegunungan hingga pesisir. Terdapat aturan khusus berkenaan dengan pembelian kerbau, sapi, dan babi yang berasal dari luar desa Cintamani, apabila mereka membeli secara mencicil, mereka harus membayar sejumlah uang muka. Transaksi semacam ini tidak akan disalahkan oleh para petugas terkait (Suarbhawa et al. 2013, 22, 23, 32, 33; Sunarya et al. 2015, 32, 33, 35). Binatang-binatang tersebut di atas sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, di samping sebagai bahan makanan juga sebagai alat transportasi, kebutuhan upacara, juga untuk menggarap lahan pertanian (Jaya 1998, 42).

Pembinaan bidang ekonomi di atas menunjukkan adanya pemberian hak istimewa bagi masyarakat Kintamani untuk

melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Hal ini dimungkinkan karena karakter dan kepribadian yang baik masyarakat dan integritasnya kepada kerajaan. Nampaknya masyarakat Kintamani masa lalu juga memiliki kemampuan dibidang teknologi dibuktikan dengan diberikannya hak untuk melakukan pekerjaan dibidang pengolahan besi, perak, dan aktivitas undagi (tukang bangunan).

Tidak terbatas pada bidang itu saja, bidang perekonomian pokok masyarakat pedesaan adalah hal utama yang dilakukan masyarakat seperti bercocok tanam, dengan mengembangkan berbagai varietas tanaman tidak hanya untuk konsumsi sendiri dan upacara tetapi masyarakat juga sudah memikirkan peluang perdagangan untuk menjual hasil-hasil pertaniannya. Aktivitas pertanian ini juga selalu berhubungan dengan ritual keagamaan, sebagai bukti bahwa masyarakat Kintamani tidak hanya berbuat untuk kehidupan duniawi juga kehidupan rohani, sebagai masyarakat yang religius dan taat.

Nampaknya juga aktivitas perdagangan desa juga telah maju, dengan dikeluarkan aturan bahwa masyarakat Kintamani berhak mengatur aktivitas perdagangan dengan komoditas utama berupa kapas. Pengembangan pertanian, kebutuhan religi, dan perdagangan ini didukung oleh aktivitas peternakan disertai aturan kerajaan yang mengatur persoalan tersebut, sebagai alat untuk pengolahan lahan, kotorannya untuk menyuburkan lahan, kebutuhan upacara, dan alat transportasi. Pernyataan di atas membuktikan bahwa pembinaan bidang ekonomi masyarakat di Kintamani telah maju dan teratur, dibarengi dengan ketaatan religi, sehingga kesejahteraan lahir batin memungkinkan untuk dicapai.

Pembinaan Pelestarian Lingkungan

Masyarakat Cintamani telah memiliki kesadaran dan ditekankan dalam prasasti kerajaan Bali Kuno, terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Pemerintah kerajaan mengenalkan istilah kayu larangan, yaitu

larangan untuk menebang pohon bodi, pohon beringin, pohon sekar kuning, dan pohon enau. Penebangan pohon tersebut hanya dilakukan dalam kondisi darurat, jika menaungi rumah, tempat pertemuan, bangunan suci, dan menghalangi saluran air. Pepohonan tersebut merupakan pohon-pohon dengan sistem perakaran yang kuat sehingga pelestariannya merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko terjadinya bencana alam, seperti longsor dan erosi mengingat daerah Cintamani berada di dataran tinggi dengan kemiringan lereng yang curam.

Selain fungsi praktis, pelestarian pohon-pohon tersebut juga memiliki fungsi khusus, misalnya untuk keperluan upacara. Selain itu pepohonan seperti jarak, dan kemoning boleh ditebang jika mengganggu lahan padi gaga, kebun kelapa, dan tempat pertemuan. Mereka diijinkan menebang segala jenis kayu larangan seperti kamiri, boddhi, beringin, kembang kuning, mendo, jirek, tidak dipersalahkan jika menaungi sawah sawah padi gaga (ladang kering), kebun, pohon penahan kali, termasuk rumah pekarangan, juga segala macamnya tidak dikenakan dosa/dipermasalahan (Suarbhawa et al. 2013, 25, 32, 33; Sunarya et al. 2015, 32, 33, 35). Pepohonan tersebut dimasukkan sebagai kayu larangan, disamping karena faktor populasinya yang terbatas, juga karena sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia juga bagi kelestarian lingkungan. Apabila penebangannya dibiarkan secara bebas dikhawatirkan populasinya akan berkurang bahkan akan cepat punah (Jaya 1998, 40).

Berdasarkan uraian di atas, pembinaan pelestarian lingkungan di Kintamani telah dilakukan sejak masa Bali Kuno, terdapat beberapa jenis kayu yang dilindungi karena memiliki perakaran yang kuat, untuk mempertahankan tanah dari longsor dan menahan air. Hal ini akan berdampak kepada lestariannya sumber-sumber air, dan mencegah terjadinya bencana alam.

Pembinaan Mental melalui Pembangunan Pertapaan

Menyinggung tentang pertapaan, pada jaman Bali Kuno, urusan pertapaan mendapat perhatian dari pemerintah yang berkuasa saat itu, hal ini dibuktikan dengan adanya petugas yang mengurus masalah pertapaan yang disebut *sangat tapa haji*, yang termuat dalam prasasti Serai AII yang dikeluarkan oleh Raja Udayana dan berangka tahun 915 *Śaka* (993 Masehi). Hal yang sama juga termuat dalam prasasti Batuan yang dikeluarkan oleh Raja Marakata dan berangka tahun 944 *Śaka* (1022 Masehi), yang menguraikan berbagai kewajiban, terutama terkait dengan pendidikan terdapat aktivitas memahat, menyanyi, menabuh angklung, gamelan, dan meniup seruling (Goris 1954, 82, 83, 97).

Pemerintah Bali Kuno, dalam menjaga pertapaannya, selain menjadi kewajiban para rohaniawan yang tinggal di sana, dalam menjaga, merawat, dan melindungi pertapaan juga menjadi tanggungjawab masyarakat yang tinggal di sekitar pertapaan tersebut. Hal ini termuat dalam prasasti Sembiran AII, yang menyebutkan bahwa apabila ada perampok yang datang ke pertapaan di Dharmmakuta maka semua penduduk desa harus datang dengan membawa senjata untuk melindungi daerah pertapaan tersebut. Penjagaan terhadap bangunan pertapaan sudah menjadi kewajiban bagi penduduk desa, dan akan diberikan hadiah oleh raja atas jasa yang dilakukan (Goris 1954, 78). Monumen-monumen semacam ini dalam pemeliharaannya juga melibatkan masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Katyagan Amarawati, mengenai tugas-tugas memelihara Katyagan Amarawati di tepi Sungai Pakerisan yang diserahkan kepada masyarakat Dewa Songan Tambahan oleh raja Udayana Warmadewa dan Gunapriyadharmmapatni (Ardika, et.al. 2013, 119).

Prasasti Sukawana AI yang dikeluarkan di Panglapan Singhamandawa atau semacam pusat administrasi kerajaan pada jaman Bali

Kuno tahun 804 Saka atau 882 Masehi. Prasasti ini menggunakan aksara Jawa Kuno atau kadang juga disebut dengan aksara Bali Kuno karena bentuk kedua aksara ini sangat mirip, tidak ada perbedaan yang spesifik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali Kuno dan merupakan prasasti Bali yang pertama kali memuat angka tahun, akan tetapi tidak menyebut nama raja yang mengamanatkan prasasti tersebut. Isi pokok prasasti berkaitan dengan perintah raja kepada para pejabat untuk membangun pertapaan yang dilengkapi dengan pesanggrahan di daerah perbukitan Cintamani.

Berkaitan dengan keberadaan pertapaan dan pesanggrahan ini diberikan semacam kompensasi atau keringanan kepada para bhiksu yang bermukim di sekitar pertapaan. Mereka dibebaskan dari kewajiban gotong-royong yang berat seperti memikul kayu, bambu, dan pekerjaan yang sejenis. Selain itu ditetapkan pula beberapa kewajiban seperti iuran, pungutan, cukai, pajak yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Diatur pula pembagian harta warisan bagi mereka yang putus keturunan, harta benda yang tak bergerak seperti sawah, ladang, kebun diserahkan kepada bangunan suci Hyang Tanda akan dipakai sebagai milik bangunan suci ini yakni semacam tanah laba pura. Harta benda seperti alat-alat rumah tangga, uang, ternak, dan yang lainnya diserahkan kepada bangunan suci Hyang Api atau ke pertapaan untuk biaya keperluan sehari-hari (Suarbhawa et al. 2013, 32).

Berbagai uraian di atas memberikan informasi bahwa pemerintah Bali Kuno sangat memperhatikan kehidupan religi, yang berdampak kepada kesehatan jiwa masyarakatnya. Sebab pada pertapaan inilah diselenggarakan berbagai pendidikan yang dikembangkan kerajaan guna mendukung tumbuhnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Pembinaan Mental melalui Sanksi Religi

Prasasti Sukawana A II, lembar 4a, 4b, 5a, menguraikan bahwa segala sesuatu yang telah

dianugrahkan kepada masyarakat Cintamani, agar tidak diungkit-ungkit oleh raja-raja yang akan datang. Itulah sebabnya dimohonkan kutukan atau persumpahan kepada para penguasa bumi Bali, yang menguasai semua tempat, dan bangunan suci sebagai penyangga bumi. Penguasa yang dimaksud adalah Bhatara Puncta Hyang, para leluhur, para dewata, Hyang Agasti Maharesi, di timur Satya, di selatan Dharma, di barat Kala, di utara Mertyu, di tenggara Kroda, barat daya Kama, barat laut Iswara, timur laut Harih Yajamanakasa Dharma, tengah, atas, bawah, matahari, bulan, tanah, air, angin, api, siang, malam, pagi, sore, yaksa, raksasa, pisacapretaasura, Garuda, Gandharwa, bintang-bintang. Kinnara, Gana, Naga Besar, Empat Lokapala, Yama, Baruna, Kuwera, Basawa, serta Putra Dewata, Panca Kusika, Nandiswara, Mahakala, Sadwinayaka, Durgadewi, Caturastra, Anantasulendra, Ananta Kalamertya, Ghana Bhuta, Raja Bhuta. Penguasa tersebut dimohon agar membunuh orang yang berbuat dusta.

Apabila ada orang yang berani merusak atau menentang isi prasasti, anugrah baginda raja kepada masyarakat Cintamani agar dikutuk oleh Bhatara. Berbagai kutukan yang berat yang akan didapatkan selama hidupnya, jika telah meninggal rohnya akan disiksa sebagai kerak kawah neraka Candra Gomuka hingga 10 ribu tahun, kemudian menjelma menjadi binatang menjijikkan, selalu ditimpa kesengsaraan yang tidak henti-hentinya. Seluruh keluarganya mati dan sengsara, dipenuhi dengan aib, dan tidak akan menemukan segala daya upaya hingga ajalnya menjemput. Penetapan prasasti ini, disaksikan oleh majelis permusyawaratan kerajaan, terutama para pendeta Siwa-Sogata (Suarbhawa et al. 2013, 21-22).

Sanksi religi diterapkan untuk mengukuhkan dan melegitimasi anugerah raja kepada masyarakat Cintamani agar tidak dipermasalahkan oleh raja berikutnya dan berbagai pihak di kemudian hari. Hal ini dapat menguatkan pendapat bahwa suatu religi atau keyakinan dapat dijadikan alat oleh penguasa

untuk melakukan pengendalian sosial (Ardika dalam Sumerata 2016, 144). Kutukan ini juga sebagai penguat bahwa apa saja yang dianugerahkan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Berbagai hal menakutkan yang akan menimpa merupakan uraian kepercayaan akan *karmaphala* yang melekat pada siapapun yang berbuat, dan tidak dapat ditimpakan kepada yang lain. Aspek inilah yang ditakutkan sehingga masyarakat masa lalu, dan sekarang yang memahami hal ini akan bersikap taat, dengan demikian anugerah raja dapat terealisasi dengan baik untuk menjamin akan terealisasinya hak dan kewajiban masyarakat.

Pembinaan Pelestarian Prasasti

Amanat untuk menjaga prasasti oleh raja terdapat pada Prasasti Sukawana B lembar 2b, dan Prasasti Sukawana C, lembar 2b. Raja mengamanatkan agar masyarakat Cintamani menjaga Sang Hyang Raja Prasasti sebagai pegangan, yang dituliskan dalam lembaran tembaga seperti menjaga jiwanya untuk mengukuhkan keberadaannya menjaga desa, sekaligus dijadikan pegangan berkenaan dengan segala padrwyahajyan (Suarbhawa et al. 2013, 23, 29). Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat Cintamani menjaga prasasti sebagai pedoman hidupnya inilah yang menyebabkan prasastinya dapat awet, sehingga dapat diwariskan secara turun-temurun. Amanat ini berdampak pada pelestarian prasasti dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

KESIMPULAN

Pembinaan mental masyarakat Cintamani dilakukan dengan penerbitan prasasti dalam rangkaian memecahkan masalah yang terjadi antara masyarakat Cintamani dengan petugas pemungut pajak, dan menciptakan stabilitas kerajaan. Dari sisi kemanusiaan, masyarakat dilarang bertindak kurang manusiawi sekalipun kepada budak yang berhutang, sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada masyarakat

golongan ekonomi lemah dari pihak pemilik modal. Untuk mendukung dan mengembangkan perekonomian masyarakat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan ijin kepada masyarakat untuk mengembangkan lahan pertanian baik kering maupun basah, membuka peluang bekerja disektor kerajinan, peternakan, dan sebagai tukang bangunan. Masyarakat juga dibina untuk selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dengan melarang menebang kayu larangan, karena berdampak pada kerusakan alam kecuali dalam kondisi darurat. Untuk menciptakan stabilitas sosial, maka raja mendirikan pertapaan untuk membina mental spiritual sekaligus semangat persatuan dan kesatuan masyarakat, dan mempertebal keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semangat ini akan menimbulkan ketaatan yang kuat, kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya. Bagi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi hukum dan sanksi agama, dan melestarikan prasasti yang menjadi pegangannya, dan selayak menjaga jiwanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan, I G. N. Tara Wiguna, I Ketut Setiawan, I Nyoman Wardi. 2013. "Sejarah Bali Kuno." Dalam *Sejarah Bali; dari Prasejarah hingga Modern*, disunting oleh Ardika, I Wayan, I Gede Parimarta, dan A.A Bagus Wirawan, 104-249. Denpasar: Udayana University Press.
- Astra, I Gde Semadi. 1997. "Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII: Sebuah Kajian Epigrafis." Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- _____. 2013. "Kitab Acuan Pelaksanaan Pemerintahan." Dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, 210-212. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Denzin, Norman K dan Yvonnas S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Penerjemah Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Geertz, Clifford. 2001. "Agama sebagai Sistem Budaya." Dalam *Seven Theories of Religion*, disunting oleh Daniel L. Pals, 395-484. Yogyakarta: Qalam.
- Goris, R. 1954. *Prasasti Bali I*. Bandung: Masa Baru.
- Jaya, I Made. 1993. "Bangunan Suci Keagamaan pada Masa Bali Kuno." *Forum Arkeologi*, No. 1: 9-17.
- _____. 1998. "Heterogenitas Mata Pencaharian Masyarakat pada Abad IX-XI." *Forum Arkeologi*, No. 3: 36-48.
- Kaelan, H. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme, Teori dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Norris, Christopher. 2009. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Haberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, Dedi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suantika, I Wayan, A.A. Gde Bagus, I Nyoman Rema, I Putu Yuda Haribuana, I Dewa Kompiang Gede, I Nyoman Sunarya, I Wayan Muliarsa, I Wayan Tagel Eddy, Anak Agung Mayun, Ida Ayu Gede Mega Suari Indria, Hedwi Prihatmoko. 2015. "Bagian II Masa Hindu-Buddha". Dalam *Sejarah Gianyar dari Jaman Prasejarah sampai Modern, Edisi Pemutakhiran*, disunting oleh Suarbhawa, I Gusti Made, A.A. Bagus Wirawan, I Made Sutaba, A.A. Gede Oka Astawa, 83-188. Denpasar: Pemerintah Kabupaten Gianyar, Balai Arkeologi Denpasar.
- Suarbhawa, I Gusti Made. 2001. "Sisi Kemanusiaan pada Kasus Utang Piutang dalam Prasasti Bali Kuno dan Jawa Kuno Abad X-III." *Forum Arkeologi*, No.1: 67-79.
- Suarbhawa, I Gusti Made, I Nyoman Sunarya, I Wayan Sumerata, Luh Suwita Utami. 2013. "Prasasti Sukawana." *Berita Penelitian Arkeologi*. Denpasar: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Arkeologi Denpasar.
- Sumerata, I Wayan. "Makna Sapatha pada Prasasti Sukawana." *Forum Arkeologi*. 29 (3): 137-146.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarya, I Nyoman. 1994. "Beberapa Kebijakan Raja sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat pada Masa Bali Kuno." *Forum Arkeologi*, No. 1: 7-12.
- Sunarya, I Nyoman, I Gusti Made Suarbhawa, I Wayan Sumerata. 2015. "Prasasti Kintamani." *Berita Penelitian Arkeologi*. Denpasar: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Arkeologi Denpasar.
- Sutaba, Made. 1993. "Peninggalan-Peninggalan Arkeologi dan Spiritualitas Masyarakat Bali." *Forum Arkeologi*, No.1: 26-31.
- _____. 2013. "Satu Abad Hari Purbakala Indonesia; Berburu Warisan Budaya Membangun Masa Depan." Dalam *Peradaban Bali-Nusra dalam Perspektif Arkeologi*, disunting oleh I Made Sutaba, 1-7. Denpasar: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Arkeologi Denpasar.
- Rahardjo, Supratikno. 2011. *Peradaban Jawa: dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- _____. 2013. "Agama." *Indonesia dalam Arus Sejarah*, 8. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ratna, I Nyoman Kutha. 2006. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turner, Bryan S, ed. 2006. *The Cambridge Dictionary of Sociology*. New York: Cambridge University Press.
- www.kbbi.kemdikbud.go.id/